

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019 dunia digemparkan dengan munculnya virus SARS-CoV-2 di China, yang kemudian dikenal dengan virus Covid-19. Virus ini mengakibatkan penyakit pada tubuh manusia seperti sesak nafas, demam tinggi, bahkan dapat berakibat meninggal dunia. Total hingga jutaan nyawa telah melayang akibat virus ini. World Health Organization (WHO) kemudian mengklasifikasikan Covid-19 sebagai sebuah pandemi. Dalam kondisi ini berbagai aktivitas manusia yang melibatkan kontak fisik dan keramaian dihentikan.

Akibat dari pandemi ini adalah perekonomian dunia yang mengalami penurunan drastis. Data dari CNBC Indonesia (2021) menyebutkan pertumbuhan perekonomian dunia pada tahun 2020 menyentuh angka -4,3 %. Indonesia sendiri mengalami deflasi sebesar -2,07 persen di tahun yang sama. Penurunan tingkat perekonomian ini disebabkan mobilitas masyarakat yang terhambat akibat kebijakan pemerintah terkait *physical distancing* berupa bekerja, belajar, dan ibadah di rumah. Berhentinya aktivitas masyarakat berkaitan juga dengan arus jual beli yang terhambat. Dengan implikasi sektor ekonomi tersebut, memunculkan masyarakat rentan dan berisiko yang menggantungkan kehidupannya dari pekerjaan yang dilakukan di lapangan.

Situasi tidak mengenakan ini berdampak pada semua lapisan masyarakat. Seperti diketahui saat ini masih banyak masyarakat Indonesia yang bertahan hidup dengan penghasilan harian. Kondisi ini juga mengancam masyarakat di sektor swasta sebagai penggerak perekonomian negara. Banyak perusahaan yang melakukan pemutusan kerja sehingga tingkat pengangguran meningkat. Kondisi ini menimbulkan vulnerabilitas atau kerentanan bagi banyak masyarakat.

Pemerintah Indonesia sudah memberlakukan serangkaian kebijakan untuk menghadapi pandemi Covid-19. Kebijakan ini berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian berganti terminologi menjadi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Beberapa kebijakan sangat memfokuskan pada minimalisir aktivitas masyarakat di luar rumah. Pembatasan aktivitas mengakibatkan berhentinya kegiatan perekonomian masyarakat di berbagai level. Dengan situasi tersebut, kebijakan pemerintah di awal masa pandemi belum bisa menyasar masyarakat kelompok rentan dan berisiko.

Alnizar dan Manshur (2022) memperhatikan pola komunikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia di awal masa pandemi. Beberapa istilah yang dilontarkan pejabat publik seperti 'new normal' dan 'enggak mudik' dianggap sebagai bahasa yang seakan memberikan rasa tenang, namun jika tidak dilakukan kebijakan yang tegas maka akan sama saja membahayakan kesehatan masyarakat. Kesan meremehkan ancaman virus juga terlihat dari pernyataan pejabat tinggi yang menyebut bahwa Indonesia mungkin kebal terhadap virus tersebut. Keterlambatan dalam penetapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga menjadi sorotan. Kesiapan dan respon awal yang buruk dari

pemerintah Indonesia menunjukkan kurang adanya *sense of crisis* terhadap pandemi.

Menurut Roziqin (2021) pada penelitiannya mengenai praktik kebijakan terhadap Covid-19 pada Maret - Juli 2020, menemukan bahwa pemerintah merespon persebaran virus dengan sangat lambat. Meski telah diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), riset ini menemukan bahwa hasilnya kurang maksimal. Kebijakan ini dirasa bersifat top-down, hanya menguntungkan kegiatan ekonomi makro, dan kurang memberdayakan masyarakat hingga akar rumput. Peran pemerintah di masa awal pandemi bisa terbilang sangat minim. Di kala berhentinya kegiatan ekonomi dan langkanya sumber pangan masyarakat, pemerintah belum segera memberikan bentuk bantuan maupun langkah strategis untuk mencukupi kebutuhan masyarakat.

Arus jual beli barang menjadi sulit dengan tidak adanya aktivitas di lapangan. Distribusi bahan pokok dari pasar ke masyarakat menjadi terhambat. Kendala yang dialami produsen atau distributor adalah kesulitan membuka usaha sehingga produk yang dijual tidak sampai ke konsumen. Sedangkan kendala yang dialami konsumen adalah minimnya akses untuk mencapai produsen dan distributor. Sehingga terjadi hambatan antara permintaan dan penawaran. Atas dinamika tersebut, muncul komunitas di Daerah Istimewa Yogyakarta bernama Sonjo (Sambatan Jogja).

Sonjo (Sambatan Jogja) merupakan komunitas gerakan kemanusiaan yang berfokus pada upaya membantu masyarakat rentan dan berisiko terkena dampak penyebaran Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Komunitas ini berusaha

mempertemukan permintaan (demand) dan penawaran (supply) terhadap barang dan bahan pokok yang dibutuhkan di masa pandemi. Gerakan komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) terbagi dalam 3 sektor yaitu kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Dengan membuat database Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), melakukan distribusi Alat Pelindung Diri (APD), hingga membuka shelter dan vaksinasi massal, Sonjo (Sambatan Jogja) mampu membantu masyarakat rentan Yogyakarta yang membutuhkan. Saat ini, komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) telah mampu menjangkau ribuan orang.

Perjalanan komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) dimulai pemecahan masalah kelangkaan masker, yang saat itu bisa diatasi dengan kerja sama dengan penjahit yang sedang merugi. Sonjo (Sambatan Jogja) kemudian menggandeng organisasi relawan Muhammadiyah untuk membantu penjembutan pasien Covid-19 untuk diantar ke rumah sakit. Komunitas ini juga berinovasi membangun beberapa shelter darurat hasil kerjasama dengan Puskesmas Bambanglipuro dan Dinas Kesehatan DIY. Mereka juga aktif dengan kegiatan vaksinasi massal yang bertujuan mempercepat distribusi vaksin bagi seluruh lapisan masyarakat. Sektor ekonomi juga menjadi perhatian Sonjo (Sambatan Jogja) dengan melakukan inovasi pasar daring bernama Etalase Pasar Sonjo yang mampu mempromosikan UMKM DIY yang sangat terdampak pendapatannya selama pandemi. Mereka juga banyak melakukan pencerdasan atau strategi bisnis bagi UMKM tersebut.

Hal yang menarik dari Sonjo (Sambatan Jogja) adalah komunitas ini mampu terbentuk secara organik melalui media sosial Whatsapp. Dengan keterbatasan pandemi dimana masyarakat dilarang bertatap muka secara langsung,

komunitas ini seakan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hanya dengan menggunakan internet. Semua koordinasi dan kegiatan mereka mampu dilakukan dari grup Whatsapp.

Perjalanan komunitas ini hingga menjadi besar tidak lepas dari kuatnya modal sosial yang dimiliki. Masyarakat DIY secara umum juga sudah memiliki jiwa sosial yang tinggi. Sonjo (Sambatan Jogja) kemudian bertransformasi menjadi sebuah gerakan civil society yang masif. Selain menjadi gerakan civil society, Komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) seakan mampu mengambil alih peran pemerintah dalam menangani kebutuhan masyarakat di awal pandemi. Pemerintah yang bekerja terlalu lamban memaksa masyarakat untuk bergerak mandiri memenuhi kebutuhannya.

Memasuki tahun 2023, masyarakat mulai terbebas dari ancaman virus Covid-19. Masifnya kegiatan vaksinasi oleh pemerintah dan pihak swasta telah berhasil membantu masyarakat untuk lebih kebal terhadap virus. Jumlah kasus baru juga makin berkurang sepanjang tahun. Namun, dengan mulai berakhirnya permasalahan pandemi Covid-19 bukan berarti komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) berakhir begitu saja.

Pada tanggal 23 Juli hingga 5 September 2023 pemerintah DIY akan melakukan penutupan TPA Piyungan. Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan merupakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang mencakup sampah dari wilayah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Sleman. Lokasi TPA Piyungan terletak di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. TPA Piyungan tengah menjadi sorotan karena permasalahan

volume sampah yang melebihi daya tampung, namun hingga saat ini masih difungsikan karena belum ada lokasi pengganti yang dapat digunakan.

Tawakal (2017) pernah melakukan penelitian terhadap pertambahan volume sampah TPA Piyungan pada bulan Januari hingga Juni 2016. Penelitian ini ingin menghitung berapa lama TPA Piyungan dapat menampung sampah dengan memperhitungkan pertambahan volume sampah tiap bulannya selama periode tertentu. Hasil riset tersebut berhasil membuat estimasi bahwa TPA Piyungan masih dapat digunakan untuk menampung volume sampah selama 57.3 bulan atau sampai dengan bulan November 2020. Estimasi tersebut muncul dengan asumsi bahwa jumlah pertambahan volume sampah di TPA Piyungan sebesar 15334.2 m³ setiap bulannya sedangkan nilai volume daya tampung TPA Piyungan sebesar 2310869 m³.

Sementara itu, dilansir dari laman Pemprov DIY, kapasitas TPA Piyungan seluas 12,5 hektar diperkirakan hanya bisa bertahan hingga akhir tahun 2022. Sedangkan mengutip dari data Bappeda Kota Yogyakarta, data mencatat volume sampah yang masuk ke TPA Piyungan mencapai sekitar 700 ton per hari. Dengan penutupan TPA tersebut menandakan awal dari kedaruratan sampah di DIY. Selama tiga tahun terakhir, tercatat tiga kali TPA Piyungan ditutup beroperasi, dan penutupan kali ini menunjukkan intensitas permasalahan pengelolaan sampah di DIY. Berbeda dengan kedaruratan akibat COVID-19 yang muncul mendadak tanpa dapat terprediksi, masalah sampah adalah masalah klasik dan sebenarnya bisa diantisipasi sejak lama.

Sampah adalah sisa dari kegiatan ekonomi yaitu konsumsi, produksi dan distribusi. Semakin tinggi tingkat konsumsi, produksi, dan distribusi, maka sampah dari kegiatan tersebut akan meningkat. Artinya, produsen sampah adalah para pelaku ekonomi itu sendiri. Semakin tinggi aktivitas ekonomi yang dilakukan, semakin tinggi pula sampah yang dihasilkan. Penumpukan sampah di TPA menjadi masalah karena selama ini pendekatan yang digunakan hanyalah memindahkan sampah dari rumah tangga, perkantoran dan dunia usaha ke TPA. Bisa dibayangkan bahwa 100% sampah hanya digeser dari rumah tangga, perkantoran dan dunia usaha ke TPA, sehingga berapa luas pun TPA baru yang akan dibangun, hanya dalam jangka pendek TPA tidak akan mampu menampung sampah. Kondisi darurat sampah ini lagi-lagi menimbulkan kerentanan bagi masyarakat DIY layaknya Covid-19 beberapa tahun silam.

Sonjo (Sambatan Jogja) kemudian aktif dalam usaha mengatasi kedaruratan sampah di DIY. Whatsapp group Sonjo Tangguh-1, yang dibangun sejak 6 Januari 2021 untuk mendukung pembangunan shelter Covid-19, berganti peran sebagai pusat koordinasi dan tukar pengetahuan pengolahan sampah. Hingga 9 Agustus 2023, tercatat 479 peserta tergabung di Sonjo Tangguh-1. Saat ini Sonjo (Sambatan Jogja) telah melakukan beberapa agenda seperti visitasi pengolahan sampah di Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada, mempromosikan kegiatan pengolahan sampah yang dilakukan Kelurahan Panggungharjo secara mandiri, dan mengadakan berbagai edukasi terkait inovasi pengolahan sampah.

Masalah sampah sudah teridentifikasi sejak lama. Alternatif teknologi pengolahan sampah, baik organik, anorganik dan residu, telah lama tersedia dan diimplementasikan. Namun demikian terdapat kesenjangan antara mindset/persepsi terhadap sampah dengan pemanfaatan teknologi pengolahan sampah yang telah ada. Meski dari sisi penawaran (supply) teknologi pengolahan sampah telah banyak tersedia, namun permintaan (demand) terhadap pengolahan sampah masih rendah karena sampah belum dilihat sebagai permasalahan yang harus diselesaikan oleh pelaku ekonomi. Di sinilah Sonjo (Sambatan Jogja) berperan dalam mengurai kedaruratan sampah di DIY dengan berusaha fokus pada upaya menghubungkan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) pengelolaan sampah.

Atas latar belakang diatas, penelitian ini bertujuan mengulik lebih jauh bagaimana komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) bisa membantu resiliensi masyarakat Yogyakarta di awal masa pandemi hingga membantu dalam isu darurat sampah. Pola kerja Sonjo (Sambatan Jogja) di masa pandemi dan isu darurat sampah pada dasarnya mirip, yaitu mempertemukan penawaran (supply) terhadap penawaran (demand). Keunikan Sonjo (Sambatan Jogja) juga akan dibahas, yaitu sebagai self-governing community dengan corak akademis yang mampu membantu kehidupan masyarakat DIY tanpa pandang latar belakang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Bagaimana komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) sebagai self-governing community berperan membangun resiliensi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) sebagai sebuah self-governing community mampu membangun resiliensi warga disaat pandemi Covid-19 dan isu darurat sampah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah pandangan baru mengenai teori self-govern community dalam kajian ilmu sosial terutama ilmu pemerintahan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian serupa lainnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi manfaat bagi beberapa pihak. Manfaat untuk pihak pemerintah adalah sebagai bahan evaluasi untuk memperkuat resiliensi masyarakat di masa krisis dan khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19. Sedangkan manfaat

untuk masyarakat diharapkan penelitian ini mampu menambah wawasan dan pencerahan dalam organisasi kemasyarakatan.

1.5 Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan topik penelitian yang akan dilakukan penulis mengenai Sonjo (Sambatan Jogja), diperlukan riset terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang membahas komunitas ini maupun mengenai konsep self-governing community dan resiliensi.

Penelitian mengenai komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) salah satunya telah diteliti oleh Aulia (2022). Riset ini menyebut Sonjo (Sambatan Jogja) telah melibatkan beberapa aspek modal sosial seperti jejaring yang luas, kepercayaan yang tinggi di masyarakat, hingga nilai dan norma organisasi yang transparan dan akuntabel. Maksimalisasi modal sosial ini kemudian diterapkan dalam tiga sektor yang menjadi perhatian Sonjo (Sambatan Jogja) yaitu kesehatan, ekonomi, dan pendidikan. Penelitian ini mengkaji kegiatan apa saja yang dilakukan untuk menghadapi pandemi Covid-19 seperti pengadaan aplikasi Etalase Pasar Sonjo, vaksinasi jimpitan, hingga program Sonjo Angkringan.

Argumen mengenai modal sosial yang dimiliki komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) juga telah diteliti oleh Wigita (2021). Penelitian ini berargumen bahwa situasi darurat dan minimnya sumber daya membuat masyarakat harus pintar bersiasat untuk bertahan hidup. Komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) kemudian mampu memaksimalkan modal sosial yang ada melalui teknologi komunikasi media sosial.

Ardhieawati (2022) menyimpulkan bahwa komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) secara langsung telah melakukan komunikasi bencana yang terdiri dari *prevention, mitigation, preparedness, dan recovery*. Kesuksesan komunitas ini dalam melakukan komunikasi bencana tidak lepas dari tingginya partisipasi masyarakat yang ada. Partisipasi yang dimaksud adalah memberikan konten edukasi, pemberian dana sumbangan, hingga partisipasi tenaga dan buah pikiran. Kesuksesan ini sangat terkait dengan pemanfaatan media sosial yang maksimal.

Berkaitan dengan media sosial, Kurniawan (2014) mengemukakan bahwa organisasi non-pemerintah juga mampu memanfaatkan teknologi tersebut untuk fokus terhadap isu lingkungan. Penelitian ini mengambil sampel 19 organisasi non-pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penguatan internet terhadap aktivisme isu lingkungan berimbas meningkatnya partisipasi masyarakat. Peran media sosial disini juga mampu menghubungkan organisasi kecil hingga memiliki koneksi internasional.

Melihat konsep *self-governing community*, maka Sonjo (Sambatan Jogja) tidak lepas dari dinamika masyarakat sipil atau *civil society*. Mengenai pengembangan *civil society*, menurut penelitian Septi (2021) yang meneliti komunitas Sekolah Tani Muda (Sektimuda) yang juga ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa adanya komunitas ini mampu mewujudkan kemandirian bagi petani dan merupakan bentuk dari *civil society*. Pertama, Sektimuda memiliki kekuatan untuk menjadi *strength civil society* dengan 2 hal yakni komunitas tanpa struktur dan trilogi filosofi. Kedua, perannya dapat bermanfaat dan diterima

masyarakat. Ketiga, kemandirian petani yang didapat yaitu kemandirian dalam hak intelektual, material, dan jaringan.

Sebuah komunitas juga dapat terbangun dengan adanya inovasi sosial yang muncul di masyarakat. Kemunculan inovasi ini salah satunya bisa karena kurangnya perhatian dan ketangkasan pemerintah dalam merespon suatu masalah. Penelitian oleh Ardhana (2022) mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat mengelola inovasi sosial di organisasi masyarakat sipil. Komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) dan Gerakan Lumantar Guyub Lung Tinulung (Gelar Gulung) dalam hal ini menjadi studi kasusnya. Riset ini menggunakan konsep kapasitas negara oleh Berwick dan Christia serta inovasi sosial oleh Mulgan. Proses munculnya inovasi sosial adalah mengidentifikasi kebutuhan dan sumber daya, penjangkaran partisipasi, pembentukan *prototype* dan skema program, pengembangan inovasi melalui difusi ide, dan proses pengembangan berdasarkan kebutuhan yang berkembang. Hasil penelitian menunjukkan Sonjo (Sambatan Jogja) telah berhasil melakukan inovasi sosial di tengah minimnya respon cepat pemerintah dalam menangkal pandemi Covid-19.

Hasil dari terbentuknya komunitas ini banyak warga masyarakat yang terbantu dalam pemenuhan kebutuhan pangan di awal masa pandemi. Sonjo (Sambatan Jogja) juga mampu menggerakkan roda UMKM dengan memanfaatkan database sebagai media para produsen memasarkan bahan pangannya. Hingga saat ini kegiatan komunitas sudah merambah hingga sektor kesehatan dan pendidikan.

Terbentuknya komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) menunjukkan salah satu peran penting *self-governing community*. Pada dasarnya konsep *self-governing community* memfokuskan pada pemberdayaan masyarakat diluar bantuan pemerintah. Kondisi *vulnerable* atau kerentanan yang ada di masyarakat belum dapat direspon cepat oleh pemerintah, sehingga Sonjo (Sambatan Jogja) mampu mengambil alih peran pemberdayaan tersebut. Hingga kini, komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) dianggap telah mampu membangun resiliensi masyarakat Yogyakarta dalam melawan pandemi Covid-19.

Penelitian-penelitian mengenai komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) mulai banyak dilakukan. Mayoritas dari riset tersebut membahas bagaimana komunitas ini mengembangkan jaringannya dan mampu menjangkau pihak-pihak rentan yang membutuhkan bantuan terkait pandemi. Namun masih sedikit atau belum ada riset mendalam mengenai pengembangan Sonjo (Sambatan Jogja) dengan konsep *self-governing community* dan perannya terhadap resiliensi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Self-Governing Community

Sørensen dan Triantafillou (2016) mendefinisikan gerakan *self-governing community* sebagai kemampuan sebuah komunitas untuk menjalankan aturan-aturan yang diperlukan tanpa adanya intervensi dari kekuasaan eksternal. Konsep ini pada dasarnya menitikberatkan pada hak masyarakat untuk bebas mengatur dan memutuskan sesuatu yang dirasa menguntungkan bagi masyarakat itu sendiri. *Self-governing community*

juga mengarah pada kemampuan masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap apa saja yang mereka lakukan.

Aturan-aturan yang dimaksud dalam komunitas adalah pola dan kesepakatan kerja. Tentang bagaimana komunitas ini bergerak untuk mencapai tujuannya. Dalam konteks komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) yang memiliki tujuan membantu masyarakat rentan dan berisiko akibat pandemi Covid-19, pastinya memiliki seperangkat aturan dan program kerja yang dilakukan.

Keberlangsungan *self-governing community* juga terbentuk tanpa adanya intervensi dari kekuasaan eksternal. *Self-governing community* pada dasarnya terbentuk dari masyarakat yang menginginkan adanya perubahan sehingga membentuk aturan dan kegiatan yang bertujuan mengembangkan kelompok masyarakat tersebut. Sehingga aturan yang ada diluar komunitas dapat disebut kekuasaan eksternal. Kekuasaan ini seringkali merujuk kepada pemerintahan baik tingkat nasional maupun daerah. Dalam konteks komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) maka komunitas ini mampu membentuk dirinya dengan seperangkat aturan tanpa bantuan pihak pemerintah.

Secara gambaran besar, studi *self-governing community* berawal dari penelitian mengenai *self-governance*. Dalam konsep tersebut menunjukkan bahwa *self-governance* mampu mengarah kepada keterlibatan hampir semua sektor sosial dari organisasi terkecil di

masyarakat hingga aktor swasta besar. Kemudian mereka mampu bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah masalah di masyarakat. Studi empirik mengenai *self-governing community* telah muncul dari berbagai sektor seperti bisnis, pendidikan, kesehatan, demokrasi, dan kebijakan publik.

Contoh sebuah *self-governing community* menurut Aleksandrov (2022) pernah terjadi pada koloni Kerajaan Inggris di New England. Di New England, pemimpin dan pejabat dipilih oleh warga koloni yang kemudian menciptakan struktur pemerintahan yang lebih inklusif dan partisipatif. Hal ini berbeda dengan di Inggris, dimana politik lokal sangat dipengauhi oleh kaum bangsawan dan pemilik tanah besar. Demokrasi lokal di New England memungkinkan munculnya *self-governing community* yang lebih mandiri dan berorientasi pada kesejahteraan bersama dibanding hierarki aristokratis di Inggris.

Dalam kasus New England, terdapat peran penting organisasi keagamaan Puritan. Institusi keagamaan ini memainkan peran penting, meski tidak selalu diformalkan dalam proses politik. Selain keterlibatan langsung mereka dalam pengembangan undang-undang kolonial, para menteri Puritan berkonsultasi dengan hakim dan gubernur mengenai banyak masalah, dan mampu bertindak sebagai perantara antara masyarakat dan hakim. Ideologi komunal berdasarkan kepercayaan Puritan ini kemudian mampu mencegah akumulasi berlebihan untuk memperlambat munculnya elit ekonomi dan memperkuat kohesi sosial.

Aleksandrov (2022) kemudian menyoroti beberapa poin utama bahwa struktur demokratis sangat penting bagi komunitas agar anggotanya dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, juga untuk memperkuat rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif. Kemudian kohesi sosial yang muncul dalam bentuk solidaritas dan kepercayaan antar anggota komunitas mampu memperkuat kemampuan mereka untuk bekerja sama. Diperlukan juga pengelolaan sumber daya secara bijak agar tetap ada keberlanjutan dalam komunitas tersebut.

Faktor pendorong yang membuat *self-governing community* dapat berjalan seperti dijelaskan dalam Sørensen dan Triantafillou (2016) diantaranya adalah kepemimpinan yang efektif, kepercayaan antar anggota, dan kemampuan komunikasi strategis. Dinamika *self-governing community* sangat bergantung pada individu masing-masing, sehingga adanya tiga faktor tadi dapat meningkatkan kemampuan *self-governing* komunitas tersebut. Ketiga faktor ini juga mempengaruhi satu sama lain.

Faktor kepemimpinan sangat penting karena dengan adanya kepemimpinan maka akan muncul sebuah pengaruh di masyarakat atau komunitas tersebut. Pengaruh ini kemudian dapat mempengaruhi arah organisasi dan penentuan sikap. Kepemimpinan serupa juga mampu menarik minat masyarakat diluar komunitasnya, untuk mau bergabung dengan menunjukkan ketertarikan dan tujuan yang sama. Apabila tidak adanya kepemimpinan yang efektif maupun inisiasi serupa dari kelompok

masyarakat, maka munculnya sebuah *self-governing community* akan sulit tercapai.

Rasa percaya antar anggota penting untuk menciptakan kesadaran bersama dalam komunitas. Kesadaran ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terhadap masalah yang dihadapi dan antar anggota dapat memiliki tujuan yang sama. *Trust* diantara anggota dapat dilakukan dengan meningkatkan kooperatif, kolaborasi, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Dengan kuatnya rasa percaya diantara anggota maka kelanjutan komunitas dapat berjalan baik.

Komunikasi dalam *self-governing community* memiliki peranan untuk menunjukkan *personal presence* atau kehadiran personal dalam interaksi. Disini komunikasi dipandang sebagai cara untuk berinteraksi, saling memahami, dan mencapai tujuan dari komunitas. Kesuksesan suatu organisasi pasti berawal dari komunikasi yang efektif dan dua arah. Komunikasi secara strategis juga mampu menguatkan anggota dan masyarakat melalui saling berbagi informasi, sosialisasi, dan pembuatan keputusan secara kolektif. Komunikasi juga bergantung pada suatu inovasi yang ada. Dalam dunia kontemporer saat ini telah banyak jenis media sebagai penyalur komunikasi, salah satunya media sosial yang mudah diakses melalui perangkat komputer maupun gawai. Kehadiran media sosial semakin mempermudah komunikasi antar anggota dalam suatu komunitas.

1.6.2 Resiliensi Masyarakat

Istilah ‘resiliensi’ telah menjadi topik kontemporer dalam diskursus perencanaan kota, manajemen bencana, manajemen darurat, hingga yang kini sering bermunculan yaitu *community disaster resilience*. Resiliensi seringkali dibahas dalam konteks manajemen bencana dengan tujuan memitigasi dampak bencana untuk mendukung fungsi sistem gawat darurat.

Teori resiliensi telah digunakan di bidang ekologi oleh Holling dan kemudian dipakai di berbagai disiplin ilmu seperti sosial-ekonomi, sosial-ekologi, teknik, geografi, dan yang terbaru yaitu perencanaan wilayah. Riset mengenai resiliensi tidak jauh berkuat pada isu perubahan iklim, serangan teroris, virus epidemik, dan lain-lain. Sementara organisasi Resilience Alliance menganggap *community disaster resilience* menjadi topik yang sering dibahas terkait dengan konsep resiliensi (2007). Pada intinya konsep resiliensi mendorong kemampuan masyarakat untuk bersiap, pulih, dan lebih sukses untuk beradaptasi terhadap potensi bencana di masa depan. Kemampuan masyarakat ini kemudian mampu menciptakan kondisi yang stabil atau setidaknya tetap mampu bertahan ditengah adanya *vulnerability* atau kerentanan akibat bencana alam, penyakit, dan lain-lain.

Kekuatan resiliensi masyarakat memang memfokuskan pada perencanaan tata ruang untuk tahan terhadap bencana. Sehingga konsep ini seakan menjadi topik riset untuk disiplin ilmu teknik dan perencanaan

wilayah. Namun, semua itu membutuhkan ketangkasan pemerintah dan masyarakat sehingga disiplin ilmu sosial-pemerintahan dapat menjadi alternatif dalam pembahasan resiliensi masyarakat. Utamanya apabila bencana yang dihadapi adalah virus pandemik.

Penelitian Xu (2021) mencoba menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *community disaster resilience*. Penelitian ini sangat konkrit dilakukan di kota Wuhan yang notabene merupakan kota pertama saat virus Covid-19 pertama terdeteksi. Riset ini menggunakan 17 model faktor dari lima dimensi yaitu modal sosial, modal ekonomi, lingkungan fisik, karakter demografis, dan faktor institusional untuk menghitung tingkat resiliensi masyarakat di Kota Wuhan.

Dimensi modal sosial memberikan faktor hubungan jaringan sosial, rasa saling percaya antar masyarakat, dan pengakuan komunitas. Dimensi modal ekonomi memberikan faktor asuransi kesehatan, status pekerjaan, nilai aset tetap, dan tingkat pendapatan. Dimensi lingkungan fisik memberikan faktor lingkungan alami, lingkungan bangunan, dan sistem infrastruktur. Dimensi karakter demografis memberikan faktor latar belakang pendidikan, tingkat kesehatan, populasi masyarakat rentan, dan kesadaran risiko dari masyarakat. Terakhir yaitu faktor institusional, dimensi ini memberikan faktor investasi dan manajemen pemerintah, kapasitas kepemimpinan, dan otonomi daerah

17 faktor tadi digunakan untuk menghasilkan sistem penilaian berdasarkan level struktural dan prioritas. Terdapat faktor langsung, faktor tidak langsung, dan faktor fundamental yang memengaruhi resiliensi masyarakat.

Faktor langsung menyangkut pada rasa saling percaya, adanya asuransi kesehatan, jumlah aset yang dimiliki, dan sistem infrastruktur yang berdampak langsung terhadap komunitas urban.

Faktor tidak langsung, menyangkut karakteristik komunitas, status pekerjaan, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, kesadaran risiko oleh masyarakat, kepemimpinan, dan otonomi daerah. Faktor-faktor ini secara tidak langsung memengaruhi resiliensi dan merefleksikan kendala dari faktor langsung tadi.

Faktor fundamental, menyangkut hubungan jaringan sosial, lingkungan alami, populasi masyarakat rentan, dan investasi dan manajemen pemerintah yang merefleksikan akar penyebab dan faktor esensial yang mampu memengaruhi resiliensi masyarakat terhadap Covid-19.

Hasil penelitian ini adalah faktor ekonomi masyarakat, vulnerabilitas demografi, infrastruktur, dan tingkat kepercayaan antar masyarakat menjadi faktor utama yang menentukan kekuatan resiliensi masyarakat di Wuhan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pada awalnya, komunitas masyarakat masih memiliki ketergantungan tinggi

terhadap peraturan pemerintah seperti implementasi aturan pembatasan Covid-19, respon gawat darurat, dan sistem peringatan dini. Kemudian, semakin kompleksnya permasalahan Covid-19 mengakibatkan masyarakat tidak bisa hanya bergantung pada intervensi pemerintah yang bersifat top-down. Penguatan terhadap komunitas di masyarakat kemudian menjadi penting untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam menanggulangi pandemi termasuk kekuatan mereka untuk segera pulih dari kejadian ini.

Sebuah komunitas memiliki potensi untuk berfungsi secara efektif dan beradaptasi pada situasi pasca bencana atau dalam hal ini pandemi Covid-19. Menurut Norris (2008) kemampuan masyarakat untuk dapat segera memulihkan keadaan berputar pada manajemen sumber daya yang rapi, komunikasi efektif, dan inovasi yang fleksibel. Manajemen sumber daya dan komunikasi efektif merupakan aspek penting dalam rangka memulihkan keadaan pasca pandemi. Kedua aspek tadi juga menjadi analisis dalam penelitian ini dengan kaitannya pada konsep *self-governing community*.

Kali ini, Norris (2008) menjelaskan bahwa kemampuan inovasi yang fleksibel artinya kemauan masyarakat yang terus melakukan pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan baru. Pengetahuan baru ini kemudian mampu diterapkan oleh mereka untuk beradaptasi dengan tantangan yang terjadi. Berbagai pengetahuan baru tadi juga diharapkan mampu meningkatkan inovasi bahkan taraf hidup mereka. Fleksibilitas dalam berinovasi juga memungkinkan mereka mengubah kebiasaan lama

mereka sebelum terjadinya situasi rentan. Disrupsi setelah terjadinya bencana dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Dalam kasus pandemi Covid-19, bentuk disrupsi yang paling kentara adalah pola penggunaan media sosial di masyarakat.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Penelitian ini berfokus terhadap bagaimana komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) sebagai self-governing community mampu membangun resiliensi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta di tengah pandemi Covid-19.

Landasan yang akan digunakan untuk menganalisis peran Sonjo (Sambatan Jogja) dalam konsep self-governing community akan dibahas menggunakan teori menurut Sorensen (2016). Konsep self-governing community yang telah disebutkan berfokus pada pemberdayaan masyarakat melalui komunitas dengan tidak melibatkan peran pemerintah. Faktor pendorong terciptanya self-governing community sebenarnya selalu ada, namun dalam penelitian ini akan membahas lebih lanjut melihat dari kepemimpinan yang efektif, kepercayaan antar anggota, dan kemampuan komunikasi strategis. Sonjo (Sambatan Jogja) akan dikaji lebih lanjut menggunakan konsep ini.

Pembahasan mengenai resiliensi masyarakat akan menggunakan teori yang telah disebutkan. Konsep resiliensi masyarakat bertujuan mempersiapkan masyarakat untuk bersiap, pulih, dan sukses beradaptasi untuk menghadapi situasi rentan seperti bencana maupun wabah penyakit. Berdasarkan penelitian Xu (2021) terdapat lima dimensi dalam menentukan kekuatan resiliensi masyarakat yaitu

modal sosial, modal ekonomi, lingkungan fisik, karakter demografis, dan kondisi institusional. Dalam hal ini Komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) akan dianalisis mengenai peranannya dalam kelima dimensi tersebut dalam upayanya membangun resiliensi masyarakat di DIY. Pembahasan resiliensi juga akan mengarah pada kondisi pasca pandemi, dimana dampak dari seluruh aktivitas Sonjo akan dinilai apakah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dari sisi inovasi yang fleksibel sesuai konsep adaptasi resiliensi masyarakat oleh Norris (2008).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif. Tentang metode penelitian kualitatif, Creswell (2008) mendefinisikannya sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif.

Adapun jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Definisi dari pendekatan deskriptif adalah pendekatan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang (Ibrahim, 1989). Penelitian nanti akan mencoba mendeskripsikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan Sonjo (Sambatan Jogja) dalam rangka menjaga resiliensi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.8.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan sebagai situs atau tempat terjadinya topik yang akan diteliti. Penelitian ini akan dilaksanakan pada komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) maupun pihak terkait lain yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan seseorang atau sekelompok orang yang kepadanya akan dicari keterangan. Diharapkan subjek penelitian dapat memberikan informasi terhadap penelitian tertentu. Berdasarkan paparan di atas, pihak yang akan menjadi subjek penelitian dalam riset ini akan berputar pada pengurus dan pihak lain yang pernah bekerja sama dengan Sonjo (Sambatan Jogja) :

1. Rimawan Pradiptyo (Inisiator Sonjo)
2. Wuri Handayani (Anggota Sonjo)
3. Gumilang Aryo (Anggota Sonjo)
4. Wahyu Gunawan Wibisono (Ketua MCCC Sewon Utara)
5. Adam Rizki Habibullah (Relawan MCCC Sewon Utara)
6. Tri Widodo (Relawan MCCC Sewon Utara)
7. Tarsisius Glory (Dokter Puskesmas Bambanglipuro)
8. Ahmad Arief Rohman (Direktur Utama BUMDes Panggung Lestari)
9. Agatha Ravi (Pegiat UMKM)
10. Lilis Cahyareni (Pegiat UMKM)

1.8.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah asal muasal dari diperolehnya data yang nantinya digunakan untuk kepentingan penelitian ini. Sumber data akan berasal dari data primer serta data sekunder.

1.8.4.1 Data Primer

Data primer merupakan asal peroleh data secara langsung dengan pemberiannya pada yang mengumpulkan data tersebut (Sugiyono, 2008). Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara, observasi atau pengamatan langsung terhadap fenomena dan permasalahan yang diteliti

1.8.4.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti. Data ini berasal perolehan bacaan dan pemahaman dari berbagai sumber seperti literatur, buku, jurnal, diskusi daring, dan penelitian terdahulu.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, sebagaimana penjelasan berikut :

1. Wawancara

Pada teknik ini terjadi komunikasi dari yang mewawancarai dan yang diwawancarai dengan interaksi secara langsung (Yusuf,

2014). Fungsi dari teknik ini sebagai pencatatan pendapat, apa yang dirasakan, serta berbagai rasa lainnya berhubungan pada perorangan pada suatu kelompok atau instansi. Melalui proses teknik ini, diperoleh data yang lebih luas lagi. Penelitian ini telah berhasil melakukan wawancara baik secara langsung maupun daring dengan pengurus, relawan, dan pihak masyarakat yang pernah terlibat dengan komunitas ini. Wawancara secara langsung telah dilakukan di Yogyakarta sebanyak dua kali pada bulan Agustus 2023 dan Maret 2024 kepada relawan MCCC Sewon Utara dan TPS3R Panggunharjo. Penelitian ini juga berhasil mewawancarai tokoh penting dalam perjalanan komunitas Sonjo (Sambatan Jogja) seperti Rimawan Pradiptyo, Wuri Handayani, Gumilang Aryo, dan Tarsisius Glory. Proses wawancara pada riset ini terbilang sangat fleksibel dengan dilakukan secara daring sehingga menghemat biaya dan waktu.

2. Dokumentasi

Dokumen adalah rekaman peristiwa masa lalu berupa tulisan manusia, gambar, atau karya monumental. Dokumen seperti kisah hidup, sejarah, biografi, peraturan dan kebijakan. Gambar dokumen, seperti foto yang diambil secara langsung maupun dari internet. Penelitian menggunakan dokumentasi melengkapi penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2008).

1.8.6 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data merupakan tahapan yang menguraikan data-data yang telah diperoleh dengan menggunakan teori-teori sebagai acuan. Menurut studi dari Miles & Huberman, bagian ini memiliki 3 aktivitas yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik simpulan untuk diverifikasi. Kegiatan mereduksi data, menyajikan data serta menarik simpulan dilakukan secara bersama dan menjadi suatu hal yang terjalin satu sama lain, sebagai tahapan serta komunikasi ketika sebelumnya, ketika terjadi, dan setelah mengumpulkan data yang linier agar terbentuk pembangunan pengetahuan secara general yang dinamakan analisa (Ulber, 2009). Sehingga proses analisis data dan interpretasi data ini dilakukan secara bersamaan dan saling terkait.

1.8.6.1 Reduksi Data

Mereduksi data dapat dimaknai sebagai kegiatan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh dari lapangan dengan mempertajam, mengelompokkan, pengarahannya, dan pembuangan data yang tidak dibutuhkan dengan tujuan supaya dapat diambil simpulan serta dilakukan verifikasi. Mereduksi merupakan cara peneliti dalam meringkas inti data yang diperoleh dan memfokuskan hanya ke hal penting saja. (Siyoto, 2015).

Peneliti dalam melakukan penelitian harus membuat data yang telah didapatkan menjadi sederhana. Tujuan dari penyederhanaan data atau reduksi data ini adalah untuk

mempermudah peneliti dalam memaknai data. Sehingga dapat diperoleh informasi yang valid mengenai permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian penelitian yang dilakukan tidak hanya sekedar pemaparan data saja namun berisi informasi yang mendalam mengenai permasalahan yang diteliti.

1.8.6.2 Penyajian Data

Dalam penyajian data harus dilakukan dengan tepat dan sistematis sehingga tidak membingungkan ketika dibaca. Dalam tahapan ini disajikan kumpulan data yang telah berbentuk informasi dengan susunan yang sistematis sehingga dapat diambil suatu simpulan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah berbentuk teks dengan disajikan secara naratif.

1.8.6.3 Penyimpulan

Tahapan terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Setelah kegiatan mengumpulkan data telah selesai, kemudian dilanjutkan dengan mengetahui data-data yang dibutuhkan, pencatatan aturan-aturan, hubungan-hubungan dari data, sebab akibat dan yang lainnya. Kegiatan terakhir yang dilakukan peneliti dalam tahapan ini adalah menarik kesimpulan dengan berdasarkan pada apa yang telah didapatkan pada pencarian data sebelumnya.